

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR BUAH RAWA BANGUN DI KABUPATEN SANGGAU

Berlinus Endo

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : berlinusendo@rocketmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar buah Rawa Bangundi Kabupaten Sanggau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan penataan pasar dan kawasan pedagang kaki lima (PKL), Pelaksanaan Program tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kabupaten, Khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan Leading Sector dalam proses pelaksanaan pengelolaan pasar, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan pasar dan penetapan kawasan pedagang kaki lima (PKL) tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya komunikasi para implementor terhadap para pedagang kaki lima dan Sumberdaya. Kurangnya Komunikasi dan Sumberdaya yang mendukung dari Pemerintah Kabupaten membuat proses pelaksanaan program tersebut menjadi kurang optimal. Sementara para pedagang yang melakukan proses jual beli barang dagangan merasa belum puas dan kurang menyentuh pedagang buah kaki lima.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Pasar.

Abstract

Thesis writing is intended to identify and describe the process of implementation of management Policies Swamp fruit market Bangundi the District. The title of this thesis was appointed based on the existing problems in the implementation process of structuring and regional market street vendors (PKL), Implementation of the program refers to Sanggau decree No. 33 of 2009 On Government Markets Structuring and Determination Zone Street Vendors. District Regional particularly the Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sector is Government, Leading in the implementation process of market management, the results of the study indicate that the process of implementation and the establishment of regional market management vendors (PKL) is not going well due to the lack of communication of the implementor of the street vendors and Resources. Lack of communication and the support of the Government Resources District to make the process of implementation of the program would be less than optimal. While the traders who do the buying and selling of merchandise was not satisfied and less touching pieces of street vendors.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, Market Management.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang telah digulirkan memberikan peluang sekalipun tantangan bagi Pemerintah kota maupun Kabupaten untuk membangun daerahnya. Sebagai salah satu tujuan dari peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, menjadi acuan penyelenggaraan otonomi daerah yang dianut dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan diberikan kewenangan untuk mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya masing-masing.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat belanja dan tokoh modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, daerah termasuk kerjasama dengan swasta dan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swasta masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil serta proses jual beli barang dengan tawar-menawar.

Pemerintah bertujuan untuk membangun sebuah tempat yang dikenal dengan pasar tradisional dengan maksud memberikan peluang kepada pedagang untuk memenuhi

kebutuhan pokok masyarakat, di pasar tersebut akan dilakukannya transaksi jual-beli, dengan syarat terjadinya transaksi ini adalah adanya barang atau jasa yang telah diperjualbelikan antara pedagang dan pembeli atas kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan tujuan utama dari kebijakan pengelolaan pasar antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan ruang yang memadai bagi pedagang agar berdagang ditempat yang telah disediakan.
2. Sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Sanggau
3. Percepatan pembangunan wilayah.

Berdasarkan peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima Pasal 11 menyatakan bahwa :

1. Setiap Pasar pemerintah Daerah yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya dibentuk pengurus pasar.
2. Tugas dan wewenang pengurus pasar sebagai mana dimaksud pasal 3 ayat 1 diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas.
3. Khusus pasar ikan yang dikelola secara khusus oleh dinas pertanian, perikanan dan perternakan Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Tim Pembina Pengelolaan Pasar Kabupaten Sanggau dan Petugas Khusus Pengelolaan Pasar Kecamatan kegiatan Pembinaan Pasar tahun anggaran 2012 menyatakan bahwa tugas dari Tim Pembina Pengelolaan Pasar Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengarahan, pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan kepada pengelola pasar kecamatan dan pengelola pasar perbatasan Entikong serta perdagangan pasar Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2012.
2. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, mengadakan rapat atau pertemuan, pendataan pasar, antara lain dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pasar tahun anggaran 2012.
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan-laporan lain yang diperlukan.

Berdasarkan daftar aset pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 dibidang pasar jumlah lapak yang ada dipasar Rawa Bangun berjumlah 31 lapak yang terdiri dari lapak A berjumlah 10 lapak, lapak B berjumlah 12 lapak, lapak C berjumlah 9 lapak. Dengan tujuan membangun fasilitas yang lebih baik sehingga terjadi proses jual beli yang berlangsung dengan baik. Namun

dari hasil pengamatan sementara dilapangan, penulis melihat fenomena sebagai berikut:

1. Pada tahun 2003 pasar tersebut awalnya sudah terdaftar jumlah pedagang sebanyak 31 orang pedagang yang melakukan perdagangan di Pasar buah Rawa Bangun. Setelah beberapa tahun berjalan para pedagang satu per satu mulai meninggalkan pasar tersebut. Pada tahun 2010-2012 para pedagang kembali berjualan di ruas jalan protokol kota Sanggau, dikarenakan oleh pembangunan pasar kurang strategis dan kurangnya komunikasi dari pemerintah terhadap pembangunan pasar mengakibatkan para pedagang merasa tidak puas dengan di banggunnya pasar tersebut (pra Survey yang bersumber dari Bidang Perdagangan Kabupaten Sanggau).

2. Pada tahun 2010 tidak ada satupun pedagang yang berjualan di pasar buah Rawa Bangun tersebut, dikarenakan tempat yang kurang strategis dan beberapa permintaan para pedagang yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh pemerintah seperti penyediaan lapak yang memadai bagi pedagang. Sebagaimana pernyataan dari beberapa pedagang (pra Survey,).

Merujuk pada hasil penelitian pendahuluan, maka masalah tersebut menarik dan penting untuk diteliti yang dituangkan kedalam Proposal berjudul Implementasi Kebijakan pengelolaan Pasar Buah Rawa Bangun di Kabupaten Sanggau.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Buah Rawa Bangun di Kabupaten Sanggau ?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar buah Rawa Bangun di Kabupaten Sanggau.

4. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau dalam rangka pengelolaan pasar buah Rawa Bangun yang lebih baik. Selain itu, dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Kajian Teori

Penggunaan istilah “kebijakan publik” oleh para ahli sangat beragam, ada yang mengatakan kebijakan tersebut sebagai studi kebijakan, kebijakan Negara dan sebagai analisis kebijakan.

Menurut Carl J. federick (dalam Agustino,2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh kelompok atau Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut pendapat James Anderson (dalam Leo Agustino

2008:7),kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu oleh seorang aktor atau kelompok.

Study Implementasi Kebijakan pada dasarnya mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Nugroho (2008: 618) Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012:149), di jelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan kebijakan”. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perwujudan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Masyarakat merupakan *target group* dari suatu kebijakan yang diharapkan dapat ikut serta dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III (dalam Widodo:2008:29) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Suatu kebijakan yang

telah ada sebelumnya akan diimplementasikan guna untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang telah dibuat tersebut sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bahkan mungkin akan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, dengan suatu kajian tersebut dikatakan berhasil jika di dalam implementasinya mampu memenuhi berbagai kebutuhan publik. Menurut Jeddawi (2008 : 91) mengatakan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Dinas, badan, kantor, unit pelaksanaan teknis di lingkungan pemerintah daerah, 2) Sektor swasta, 3) Lembaga swadaya masyarakat, 4) Komponen masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan ini sesungguhnya menyangkut aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif dan merupakan pelaksanaan berbagai program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan seperti perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, yang menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran dan menyangkut kedalaman masalah kekuatan politik, ekonomi, serta sosial yang langsung atau tidak dapat

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi (*Pra Survey*), maka peneliti menggunakan salah satu teori dalam implementasi kebijakan publik yang diutarakan oleh Edward III (dalam Widodo 2008: 95) yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

2. Metode penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh dalam penelitian adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyamanan melalui proses berfikir induktif karena bersifat penjelasan yang terperinci.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini seperti teknik penelitian *purposive sampling*. Bungin (2010:53) *purposive sampling* merupakan penunjukan informan secara sengaja. Dimana informan tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi objek dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini meliputi Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana pasar di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sanggau, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sanggau, Staf pengelola pasar, Koordinator pengelolaan pasar dan para pedagang buah kaki lima di Kabupaten Sanggau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi yang selanjutnya untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi.

3. GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian maka dalam pelaksanaan komunikasi antara Dinas dan pedagang belum terlaksana dengan baik, hal tersebut terbukti setelah peneliti melakukan penelitian secara lebih mendalam dimana dalam pelaksanaan Komunikasi masih terdapat beberapa kendala diantaranya dalam proses penyampaian Transmisi seringkali terjadi miskomunikasi seperti dalam hal proses sosialisasi yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang diterapkan kurang dapat diterima oleh masyarakat.

Kemudian terkait dengan Kejelasan dimana dalam pelaksanaan kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, namun pada kenyataan dilapangan peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dari pasar tersebut, sehingga membuat pedagang yang berjualan di Pasar rawa bangun pindah ke ruas jalan

protokol, hal ini di karenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dan hanya dilakukan kepada para pedagang saja.

Terkait dengan Konsistensi dimana perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas namun kenyataan yang ditemui di lapangan Pemerintah hanya melakukan sosialisasi dengan para pedagang dan tidak melakukan sosialisasi dengan masyarakat sehingga kebijakan yang di keluarkan menjadi tidak jelas serta kurang dimengerti oleh masyarakat. Untuk mencapai hasil yang maksimal tentunya harus dilakukan secara intensif, apabila penyaluran komunikasi yang diberikan berbeda maka yang terjadi adalah salah pengertian atau miskomunikasi.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III Sumber Daya mempunyai peran penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan: “Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian tersebut, jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya yang ada belum dapat menunjang jalan proses pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan pasar buah rawa bangun, hal ini dapat di lihat dari sumber daya manusia yang belum mencukupi terutama

pegawai dari Disperindagkop dan UKM yang mengurus pelaksanaan pasar dirasa tidak mencukupi.

Kemudian terkait dengan Sumber Daya Anggaran, dengan danayang digunakan dalam penataan pasar tersebut belum mencukupi hal ini terlihat dalam penyediaan fasilitas seperti lapak yang kurang luas sehingga mengakibatkan para pedagang tidak bisa berkembang dan merasa kesulitan untuk membuka usahanya.

Terkait dengan Sumber daya informasi dan kewenangan, yaitubagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan yang hendaknya dilengkapi dengan kewenangan yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini isperindagkopdan UKM telah menjalankan impelemntasi kebijakan dengan cara menginformasikan kepada para pedagang buah yang belum terdaftar sebagai pedagang yang menempati pasar tersebut untuk mem uka usahanya di kompleks pasar buah rawa bangun.

Kemudian untuk fasilitas berdasarkan hasil penelitian yang saya peroleh terlihat bahwa fasilitas yang tersedia terutama seperti lapak yang disediakan dirasa pedagang masih kecil dan belum memadai sehingga mengakibatkan semua barang dagangan tidak dapat dijual di lapak tersebut.

3. Disposisi

Menurut Edward III mengungkapkan bahwa disposisi adalah kemauan, keinginan,

dan kecendrungan para pelaku kebijakan manakala pelaku kebijakan tersebut dapat mengetahui dan memahami arah dan tujuan dari program tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian saya memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai mengetahui tujuan dan program terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, namun kenyataan di lapangan masih banyak pedagang yang belum menaati ketetapan dan peraturan yang di buat tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang baik tentu akan menolong untuk mencapai pelaksanaan yang baik dalam organisasi-organisasi. Sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah di putuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik. Berdasarkan hasil dalam penelitian terkait dengan struktur birokrasi diperoleh bahwa telah terdapat sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara Disperindag dengan instansi terkait seperti satuan polisi pamong praja, Kecamatan dan pihak Desa.

4. SIMPULAN, IMP IKASI, DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka

peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

Komunikasi antara pemerintah terhadap para pedagang buah kaki lima khususnya di Kabupaten Sanggau masih kurang efektif. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap pembangunan pasar Rawa Bangun yang kurang strategis, dan sebagian besar pernyataan yang telah diungkapkan oleh para pedagang buah kaki lima Rawa Bangun.

Lemahnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sebagai faktor pendukung jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan pasar dan penertiban kawasan pedagang buah kaki lima. Kurangnya jumlah pegawai yang bertugas sebagai pengelola pasar serta mengawasi dan membimbing para pedagang buah kaki lima. Kemudian dengan danayang kecil untuk kegiatan penataan pasar serta pemenuhan berbagai fasilitas belum mencapai kepuasan dari para pedagang buah kaki lima, membuat proses pengelolaan pasar dan penetapan kawasan pedagang buah belum bisa berjalan dengan maksimal. Jika dilihat dari variabel Disposisi pelaksanaan sudah cukup baik dan Struktur Birokrasi masih ditemui kurangnya koordinasi antara implementor pelaksana sehingga penetapan kawasan pedagang kaki lima belum terlaksanakan dengan maksimal.

2. Implikasi

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten, pihak terkait dan para pedagang buah kaki lima dalam menjalankan kebijakan dari Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi terhadap pengelolaan pasar tradisional yang efektif. Selanjutnya, diharapkan dapat berguna bagi kalangan selanjutnya untuk memperkaya pengetahuan kemampuan teoritik dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi berikutnya.

3. Saran

Saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan pedagang hendaknya perlu mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2009 tersebut sehingga dalam proses implementasi kebijakan dapat terlaksanakan secara efektif.
2. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan sumber daya baik itu staf, anggaran dan penyediaan fasilitas. Sehingga apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat atau pedagang.

4. Keterbatasan Peneliti

Adapun keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian adalah :

1. Kurangnya pemikiran yang luas menyebabkan Peneliti merasa

kesulitan untuk menggali lebih mendalam terhadap permasalahan penyusunan yang menyangkut variabel Komunikasi dan Sumber daya.

2. Keterbatasan yang dirasakan selama penyusunan skripsi ini, peneliti masih merasakan kurangnya pemahaman dalam menganalisis masalah yang terjadi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kurang terampilnya peneliti dalam penyusunan kali ini menyebabkan peneliti merasa kesulitan untuk menuangkan isi pemikiran dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

-----, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Penelitian Kualitatif: pemahaman filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edward III. George C. 1980. Implementasi public Policy. Jakarta: Gramedia.

Grindle S, Mirrelle,. 2007. Going local Decentralization, and The Promise of Good Governance, New Jersey: Princeton University Press.

Hasibuan S.P. Malayu, 1984. Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah, Bandung: CV Haji Masajung.

Jeddawi, Murtir, 2008. Implementasi Kebijakan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: ITS Press.

Riant, Nugroho. 2011. Public Policy. Jakarta: PT. Gramedia.

Santoso, Setiansah. 2010. Teori Komunikasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Belajar

-----, 2010. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin, A. 2001, Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara. Malang: Bumi Aksara.

Wibawa, Samudera, dkk. 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : Raja Grafindo.

Winarno, Budi. 2012, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Jakarta: CAPS.

Widodo, Joko. 2006, Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayumedi .

-----, 2008, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat belanja dan toko modern.

Pemerintah Kabupaten Sanggau, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah

dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki
Lima (PKL), Sanggau, 2009.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Keputusan Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Sanggau Nomor 15
Tahun 2012 Tentang Penetapan petugas
pengelola pasar tahun Anggaran 2012.
Pemerintah Kabupaten Sanggau.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BERLINUS ENDO
NIM / Periode lulus : E42009014/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : berlinusendo@rocketmail.com/085250755459

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PASAR BUAH RAWA BANGUN DI KABUPATEN SANGGAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

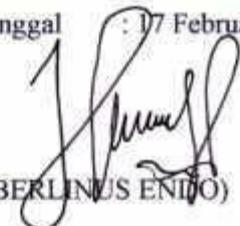
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 17 Februari 2014


(BERLINUS ENDO)